

## **NOTA PENGANTAR**

### **PENJELASAN**

# **RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PEMERINTAHAN DESA**



**2025**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

## DAFTAR ISI

BAB I Latar Belakang.....	2
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan Penyusunan.....	3
D. Dasar Hukum.....	4
BAB II POKOK PIKIRAN .....	5
BAB III MATERI MUATAN	
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	6
B. Ruang Lingkup Materi.....	6
BAB IV PENUTUP	
A.    Simpulan .....	7
B.    Saran.....	7
Daftar Pustaka.....	8

## BAB I

### Pendahuluan

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memuat Asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan.

Dalam pelaksanaan amanat undang-undang tersebut tentunya dibutuhkan norma dan kebijakan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati demi terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib dan akuntabel.

Salah satu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel adalah tata kelola administrasi yang standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini standarisasi yang meliputi format tata persuratan dan dokumen administrasi desa lainnya yang terlampir dalam Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini didasari asas efisien dan efektif, asas pembukuan, asas akuntabilitas, asas keterkaitan, asas kecepatan dan ketetapan dan asas keamanan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tatanaskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 2.

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas ;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas.

## B. Identifikasi Masalah

Pemasalahan tata naskah dinas pemerintah desa seringkali mencakup ketidak sesuaian dengan peraturan sehingga tidak adanya keseragaman yang menjadi salah satu faktor yang menghambat efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun hal-hal permasalahan yang teridentifikasi antara lain :

- Penulisan tata naskah dinas tidak merujuk pada peraturan yang berlaku;
- Kurangnya pemahaman tentang jenis nasakah dinas, penggunaan lambing, logo dan cap dinas serta penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- Kurangnya pelatihan atau sosialisasi mengenai tata naskah dinas yang efektif;
- Pengelolaan tatanaskah dinas masih bersifat manual sehingga rentan dari kehilangan, kerusakan, keamanan dan keaslian tata naskah sehingga menyebabkan kurang efektif dan efesien.
- Kurangnya pemahaman terkait kewenangan pejabat dan pelaksana tugas dalam menandatangani naskah dinas;
- Kurangnya pengetahuan pemerintah desa terkait sifat surat dan jenis surat;
- Penggunaan format tata naskah dinas yang beragam.

## C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati Tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa antara lain :

- Sebagai landasan hukum dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun, mengendalikan dan mengamankan naskah dinas pemerintah desa;
- Menciptakan keseragaman tata naskah dinas pemerintahh desa;
- Menciptakan tata kelola naskah dinas yang efektif dan efesien;
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan dan akuntabel.

## D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa ;
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas ;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas.

## BAB II

### POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran penyusunan Peraturan Bupati Tentang Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa adalah untuk mengatur dan menyelaraskan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah desa sehingga menciptakan komunikasi tertulis yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan perkembangan jaman serta bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan, pembuatan, pengaman dan pengendalian tata naskah dinas pada pemerintah desa.

## BAB III

### MATERI MUATAN

#### A. Sasaran, Jangkauan dan Arahan Pengaturan

Sasaran pengaturan peraturan bupati tentang tata naskah dinas pemerintahan desa untuk menciptakan kesamaan pemahaman dan pelaksanaan tata naskah dinas di seluruh instansi pemerintah baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Jangkauan peraturan bupati ini mencakup semua aspek terkait dengan persiapan, pengelolaan naskah dinas dilingkungan pemerintahan desa dengan rincian :

- Jenis, susunan dan bentuk naskah dinas (mengatur jenis naskah dinas yang digunakan seperti surat dinas, keputusan, instruksi, edaran dan lainnya);
- Pembuatan naskah dinas (menjelaskan prosedur dan langkah langkah penyusunan naskah dinas hingga pengesahan);
- Pengamanan naskah dinas (tata cara mengamankan naskah dinas agar tetap terjaga keaslian, keabsahan, dan kerahasiaannya);
- Pejabat penandatangan naskah dinas (mengatur kewenangan penandatanganan naskah dinas);
- Pengendalian Naskah Dinas (mengatur pengendalian naskah dinas keluar dan naskah dinas masuk serta mekanisme pengawasan dan pembinaan terhadap tata naskah dinas).

Arahan pengaturan peraturan bupati tentang tata naskah dinas pemerintahan desa meliputi antara lain :

- Jenis Naskah Dinas;
- Susunan naskah dinas;
- Bentuk naskah dinas;
- Pengamanan;
- Pejabat penandatangan; dan
- Pengendalian naskah dinas

#### B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi penyusunan peraturan bupati tentang Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa meliputi ketentuan umum, jenis , susunan dan bentuk naskah dinas, pembuatan naskah dinas, pengamanan, pejabat penandatangan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.

#### E. Penutup

##### a. Simpulan

Dengan demikian, kebijakan tata naskah dinas yang efektif dan efisien sangat penting dalam mendukung pemerintahan yang transparan

dan akuntabel yang mana diyakini bahwa kebijakan ini akan berimplikasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kualitas komunikasi dinas yang lebih baik.

b. Saran

Diharapkan rancangan produk hukum ini dapat menjadi perhatian tim penyusun untuk berperan aktif dan menyiapkan referensi dalam proses penyusunan, pembahasan, pengundangan dan penerapannya.

Demikian beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai pengantar penyampaian Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156).
4. Perka ANRI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas ;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;